MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH**I Wayan Sutrisna**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar
E-mail: sutrisna76@yahoo.co.id

Abstrak - Pola pembangunan yang dilaksanakan sejak Indonesia merdeka terus mengalami perbaikan seiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat sentralistik. Sedangkan memasuki era reformasi pola pembangunan sudah menerapkan kebijakan desentralisasi dengan pemberlakuan aturan tentang otonomi daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.

Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah tujuan setiap bangsa. Namun hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang klasik bagi setiap pemerintahan di dunia ini khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan dibentuk melalui kondisi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program yang dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi yang terealisasi melalui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi, sumber daya manusia, selain itu juga manajemen dan distribusi sumber daya tersebut.

Kebijakan desentralisasi sebagai salah satu kebijakan sentral di era reformasi memiliki tujuan mulia yakni pemertaan pembangunan. Dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan dilaksanakan dan disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan menggali sumber-sumber daya daerah serta memperhatikan kearifan local daerah. Pemberian wewenang kepada daerah diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Partisipasi ini akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mensukseskan pembangunan itu sendiri. Kesuksesan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara teori akan memiliki hubungan yang bersifat negatif dengan kondisi kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan

PENDAHULUAN

Kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama setiap pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Untuk mencapai kesejahteraan ini dilakukan dengan berbagai cara terutama melaksanakan pembangunan di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaannya

pada tanggal 17 Agustus 1945 juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sejak mendeklarasikan kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia, telah dilaksanakan proses pembangunan menuju tujuan sesuai dengan cita-cita perjuangan pada saat merebut kemerdekaan.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia mer-

upakan usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan dan pemberdayaan seluruh komponen dalam kehidupan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional. Yang menjadi Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Definisi Pembangunan menurut S.P Siagian adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation-Building). Ide pokok dalam pengertian pembangunan yakni pembangunan merupakan suatu proses, usaha yang secara sadar dilakukan, serta dilakukan secara berencana, dan mengarah kepada modernitas. Selain itu usaha pembangunan yang dilaksanakan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.

Pola pembangunan yang dilaksanakan sejak Indonesia merdeka terus mengalami perbaikan seiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia leb-

ih bersifat sentralistik. Perjuangan yang dilakukan oleh mayoritas komponen bangsa melalui tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1998 telah berhasil mengubah tatanan negeri ini dari pemerintahan yang terpusat di Jakarta atau bersifat Sentralistik menuju ke arah Desentralisasi. Pada era ini yang dikenal dengan era reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meresponnya dengan mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pada pasal 18 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diamandemen menjadi pasal 18, 18 A dan 18 B.

Implementasi dari amandemen yang dilakukan terkait pengaturan pemerintahan daerah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mana kedua Undang-Undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Seiring perkembangan ketatanegaraan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah disebutkan bahwa Pemberian hak otonomi kepada daerah bermakna bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya di luar enam urusan yang masih diatur oleh pemerintah pusat yakni : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter serta fiskal nasional, dan Agama.

Salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan adalah seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat atau dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan efisiensi dan efektivitas pembangunan tersebut. Karena pada prinsipnya pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat sehingga peran serta masyarakat menjadi hal yang utama dalam setiap prosesnya. Partisipasi masyarakat harus dilakukan dalam semua tahapan baik itu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam rangka menjamin hak masyarakat serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan

sosial.

Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah tujuan setiap bangsa. Namun hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang klasik bagi setiap pemerintahan di dunia ini khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Meskipun penanggulangan kemiskinan selalu menjadi pokok bahasan dan janji-janji kampanye para calon legislatif maupun eksekutif seperti calon presiden dalam pilpres, gubernur dan bupati dalam pilkada, tetapi masyarakat miskin masih tetap ada dan kadang kala ‘terlupakan’ pada saat sang calon sudah menduduki jabatan yang diinginkan.

Masalah Kemiskinan, Penyebab dan Penanggulangannya

Portal berita TEMPO.CO pada tanggal 17 Juli 2017 memuat berita bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada maret 2017 jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Meskipun dalam berita yang diunggah oleh Kompas.com tanggal 08-08-2017 disebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan yang dicapai ini tidak diimbangi dengan penurunan jumlah masyarakat miskin. Ini menunjukan pertumbuhan ekonomi yang dibukukan ini tidak berkualitas artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja namun masih banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Michael P Todaro bersama Stephen C Smith (2004) dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga mengemukakan bahwa kemiskinan adalah rendahnya pendapatan perkapita dan lebarnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Para ahli ekonomi pembangunan mulai mengukur luasnya atau kadar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu negara dan kemiskinan relatif antar negara dengan cara menentukan atau menciptakan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang digunakan adalah konsep kemiskinan ab-

solut (*absolute poverty*) yaitu konsep untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik minimum setiap orang berupa kecukupan makanan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (2005) memberikan pandangan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam Buku Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang disusun oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia tersebut juga disebutkan bahwa Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Lembaga penelitian SMERU mengemukakan bahwa pengertian kemiskinan harus mencakup berbagai dimensi sebagai berikut.

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
- 2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
- 3) Tidak adanya jaminan masa depan

(karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

- 4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- 6) Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Kemiskinan merupakan kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber yang ada sehingga sebagian masyarakat yang “kurang beruntung” tidak dapat menikmati hasil dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah meskipun hasil itu hak seluruh masyarakat. Lembaga penelitian SMERU juga menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi di suatu negara/wilayah disebabkan oleh banyak faktor antara lain :

- 1) Kegagalan kepemilikan terutama lahan dan modal.
- 2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
- 3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- 4) Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- 5) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)
- 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- 7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- 8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
- 9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia, Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia telah merumuskan lima strategi utama yakni:

1) Perluasan kesempatan

Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat

Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya untuk memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan hak-hak dasar.

3) Peningkatan kapasitas

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

4) Perlindungan sosial

Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

5) Penataan kemitraan global

Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menataulang hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas.

Kemiskinan dibentuk melalui kondisi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program yang dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi yang terealisasi melalui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi, sumber daya manusia, selain itu juga manajemen dan distribusi sumber daya tersebut. Dengan demikian masalah kemiskinan adalah merupakan hal yang sangat kompleks.

Kebijakan Desentralisasi Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan di seluruh negeri memang merupakan salah satu cita-cita dari kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga oleh para pahlawan bangsa. Untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dilakukan dengan memberlakukan kebijakan desentralisasi yang memberikan sebagian kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Kebijakan desentralisasi telah lama diselenggarakan di Indonesia, bahkan sejak pra-kemerdekaan, tetapi kebijakan desentralisasi yang progresif baru dilaksanakan ketika Indonesia memasuki era-reformasi pada masa Pemerintahan Presiden B. J Habibie dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Meski Kebijakan ini telah dituangkan dalam Undang-Undang sejak tahun 1999 namun secara efektif diimplementasikan mulai awal 2001. Sehingga mulai tahun 2000 pemerintahan-pemerintahan daerah di Indonesia sudah mulai menyesuaikan setiap kebijakan yang dikeluarkan mengarah kepada Undang-Undang tersebut. Pemberlakuan Kedua Undang-Undang itu pada dasarnya telah membuka perspektif dan peluang baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kebijakan ini telah mengubah basis pendekatan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dari yang bersifat top-down menjadi bersifat bottom-up.

Menurut I Made Leo Wiratma, dkk, 2007, Tujuan kebijakan desentralisasi adalah mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dan demokrasi. Ini meliputi paling kurang empat hal : pertama, perluasan partisipasi dalam kegiatan politik, sosial dan ekonomi yang memperkuat proses demokrasi. Kedua, perbaikan pelayanan umum yang makin efisien dan efektif. Ketiga perbaikan kinerja pemerintah daerah melalui pertanggungjawaban publik, transparansi atas proses-proses kerjanya dan responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keempat, perluasan akses pada pengambilan Keputusan politik

bagi wilayah dan kelompok yang terpinggirkan sehingga distribusi sumber-sumber makin merata.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang merupakan implementasi dari Kebijakan Desentralisasi lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam kedua Undang-Undang ini menyebutkan otonomi daerah adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring Perkembangan demokrasi dan ketatanegaraan menyebabkan DPR dan pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Otonomi daerah. Kebijakan Desentralisasi pada prinsipnya dilaksanakan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban agar terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera sesuai dengan harapan di bentuknya Undang-Undang tersebut.

Tujuan mulia dari kebijakan desentralisasi ini adalah pemerataan pembangunan yakni pembangunan dilaksanakan dan disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan menggali sumber-sumber daya daerah serta memperhatikan kearifan local daerah. Pemberian wewenang kepada daerah diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Partisipasi ini akan mampu menjadi kekuatan yang

luar biasa dalam mensukseskan pembangunan itu sendiri. Kesuksesan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara teori akan memiliki hubungan yang bersifat negatif dengan kondisi kemiskinan. Dimana apabila kesejahteraan masyarakat meningkat maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan.

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dimana saat ini penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari seperempat milyar orang merupakan potensi yang luar biasa bagi penopang proses pembangunan di negeri ini. Sumber daya manusia yang dimiliki ini apabila diarahkan dengan optimal akan mampu menjadi kekuatan utama pendukung pembangunan nasional. Bahkan para ahli memperkirakan pada tahun 2020 hingga 2035 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana penduduk usia produktif menjadi mayoritas penghuni wilayah Indonesia. Namun keberadaan penduduk yang banyak ini kadang juga merupakan hambatan yang sangat mengganggu proses pembangunan. Penduduk yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi hambatan dalam pembangunan ini.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat akan menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek atau penerima manfaat saja. Dengan Partisipasi ini membuat masyarakat akan merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat akan mengarah kepada pemberdayaan masyarakat karena melalui partisipasi dalam seluruh proses, masyarakat akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan proses tersebut kearah pencapaian kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

pasal 28C ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan membuat hasil pembangunan mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat dan pembangunan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Masyarakat yang partisipatif dalam proses pembangunan mengandung arti bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Partisipasi masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut aktif. Jumlah penduduk yang banyak serta diimbangi dengan partisipasi yang tinggi membuat penduduk menjadi kekuatan besar dalam segala kegiatan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia pada umumnya saat ini masih sangat rendah. Masyarakat masih enggan untuk terlibat secara langsung dalam seluruh proses baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rendahnya partisipasi ini akibat dari kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam memberikan ruang bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai pada tingkat desa hingga nasional dianggap oleh sebagian masyarakat hanya proses serimonial belaka. Musrenbang yang dilaksanakan selama ini hanya melibatkan segelintir elit dalam masyarakat saja dan tidak memberikan ruang yang cukup kepada mayoritas masyarakat.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nation Development Program (UNDP) juga telah memasukkan partisipasi masyarakat dalam salah satu indikator atau karakteristik pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan menunjukkan bahwa pemerintahan yang berkuasa telah melaksanakan proses pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan salah satunya dapat dilakukan dengan mendesak pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat dalam proses pembangunan baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dari pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama juga perlu ditingkatkan. Pembangunan yang dilaksanakan bukanlah hadiah yang harus diterima apa adanya, namun sebuah proses menuju kearah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga masyarakat harus mau dan mampu bersuara apa yang mereka perlukan untuk menuju arah tersebut.

Mewujudkan Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahtraannya secara mandiri. Ini mengandung arti bahwa masyarakat diberikan peluang serta dorongan untuk memperbaiki kesejahtraannya secara aktif tidak hanya mengandalkan usaha dari pemerintah saja. Masyarakat yang aktif dan berdaya akan mampu meningkatkan kesejahtraannya sendiri dan pemerintah hanya memfasilitasi.

PENUTUP

Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan momok bagi sebuah pemerintahan di negara manapun. Tingkat kemiskinan dapat dijadikan indikator terhadap keberhasilan maupun kegagalan bagi resim pemerintahan yang berkuasa. Penyebab kemiskinan bukan saja karena kegagalan dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kadang kala kemiskinan itu merupakan efek dari sikap para penduduk yang dikategorikan miskin yang memang "tidak mau" untuk keluar dari jalur kemiskinan yang mereka sandang. Setiap program dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas yang peduli selalu akan gagal apabila tidak didukung oleh masyarakat yang dianggap miskin ini. Untuk itu program fisik saja tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks tersebut. Mendorong kesadaran mereka untuk mau dan berusaha keluar dari garis kemiskinan

juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Dengan mereka mau dan berusaha, niscaya setiap program fisik yang dilaksanakan akan didukung sehingga tujuan dari program pengentasan kemiskinan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Hasil pembangunan fisik yang gemerlap yang kita lihat belakangan ini memang menunjukkan suatu proses pembangunan telah dapat dilakukan dengan baik. Namun keberhasilan ini ternyata belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah saat ini masih banyak menyisakan kantong-kantong kemiskinan khususnya di daerah-daerah pedesaan dan perkampungan kumuh di dalam kota. Anggapan keberhasilan pemerintahan dengan hanya mengukur tingginya pertumbuhan ekonomi setiap tahun oleh pemerintah yang berkuasa merupakan hal yang belum mampu membawa negeri ini kearah kemakmuran. Secara statistik pertumbuhan ekonomi negara kita memang cukup tinggi bahkan termasuk diantara pertumbuhan ekonomi tinggi diantara negara-negara di dunia yang sebagian besar masih mengalami krisis ekonomi. Namun pertumbuhan yang tinggi ini belum dibarengi dengan pertumbuhan yang berkualitas dimana pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berkualitas mengakibatkan semakin lebarnya jurang pemisah antara si-miskin dengan si-kaya. Para pengusaha besar mampu menikmati pertumbuhan ekonomi ini dengan semakin bertambahnya harta kekayaannya. Sedangkan rakyat miskin semakin menderita akibat keadaan yang membelenggu mereka.

Berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah di era otonomi daerah ini. Program seperti bedah rumah, pendidikan gratis, berobat gratis, dan program lainnya telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program-program ini diyakini sudah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Kebijakan Desentralisasi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pemerataan pembangunan ini sangat penting dilakukan untuk menghindari perpecahan

bangsa ini akibat banyak daerah merasa kurang mendapatkan porsi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penyerahan wewenang kepada masing-masing daerah dalam pemerintahan dan pembangunan diharapkan akan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok-pelosok, sehingga mayoritas masyarakat dapat berpartisipasi dalam men-sukseskan pembangunan nasional.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan merupakan hal yang harus dilakukan di era pembangunan yang modern ini. Partisipasi yang berarti peran aktif dan pelibatan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan akan mampu mewujudkan hasil pembangunan yang mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang baik untuk melaksanakannya. Pemerintah wajib mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini. Pola ini membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pada pembangunan.

Model pembangunan yang partisipatif merupakan pemecahan masalah dalam mengatasi ketidak merataan pembangunan dan permasalahan kemiskinan yang dialami bangsa dan negara saat ini. Pola ini akan mampu menekan jumlah masyarakat miskin karena seluruh masyarakat sudah dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan dan proses pembangunan. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif harus diusahakan oleh setiap pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Hanya model pembangunan seperti ini akan mewujudkan hasil pembangunan yang dapat dinikmati merata di seluruh negeri dan juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pola ini diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga tingkat kemiskinanpun akan mampu ditekan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Kaho, J.R. 1997. *Prospek otonomi di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo persada.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2005. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)*. Jakarta.
- Lembaga Penelitian SMERU. tt. *Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Leo Wiratma I Made, Djadijono M, Legowo TA. editors. 2007. *Membangun Indonesia Dari Daerah, Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*. Jakarta. CSIS.
- Mandica, Notrida. 2001. *Desentralisasi, Anggaran daerah, dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta. Kompas, Juni Nomor 338 tahun Ke-36, PT Kompas Media Nusantara.
- Siagian. S. P. 1983. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta, PT Gunung Agung.
- Sumarto, Sudarno, Asep Suharyadi, Alex Arifianto. 2004. *Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya, (Amandemen I, II, III dan IV)*, Penabur Ilmu.
- <https://bisnis.tempo.co>
ekonomi.kompas.com
www.bps.go.id
www.kemendagri.go.id